

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI
(LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunianya, sehingga Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar (DISPMPTSPTK) dapat di susun.

Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada pelaksana pemerintahan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Tersusunnya LKPJ Tahun 2022 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal meskipun masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2022.

Semoga LKPJ Dinas PMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini dapat bermanfaat terutama untuk bahan evaluasi bagi yang berwenang untuk menilai kinerja staf dalam Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 9 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja,



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.

Panglima Pembina Utama Muda

NIP. 19750101 199903 1 010

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi	2
1.3. Jumlah aparatur sipil negara, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	8
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	9
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	15
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	16
2.1.4. Analisis kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	17
2.1.5. Inovasi	17
2.1.6. Prestasi dan Penghargaan	19
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	27
2.3. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021	27
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	28
3.1 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan	28
3.2. Hambatan- Hambatan	28
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas PMPTSPTK merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja.

1.1. Gambaran Umum Dinas PMPTSPTK

Dinas PMPTSPTK sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : B
- b) Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
- c) Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com
- d) Titik koordinat : **S** 6,11924, **E** 120,467141
- e) Foto kantor



1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSPTK mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSPTK yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSPTK dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
9. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis tenaga kerja;
10. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
12. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
13. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

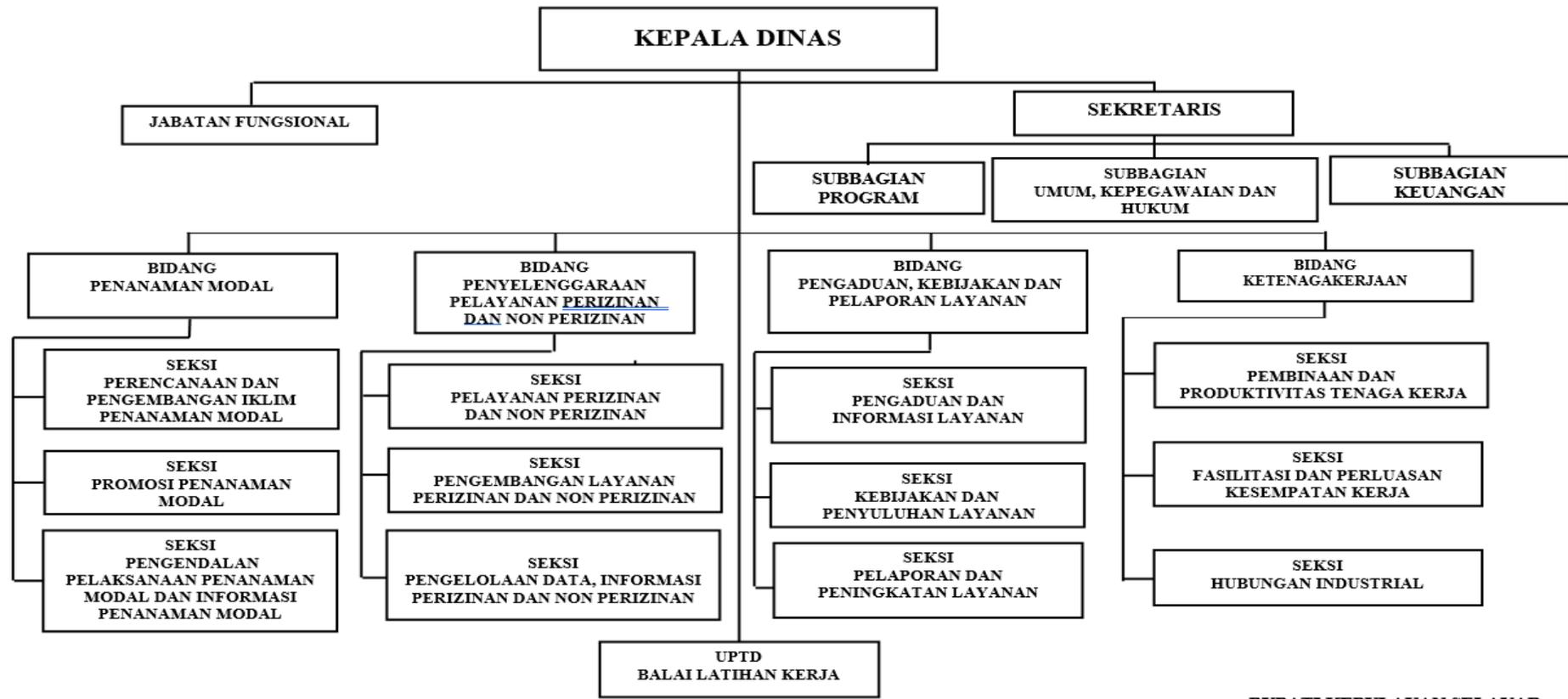
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Subbagian Keuangan

3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ikim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terdiri atas;
 - a. Seksi Pelayanan dan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Seksi Pengembangan Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Seksi Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri atas;
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
6. Bidang Pelatihan Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas;
 - a. Seksi Pembinaan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 PERANGKAT DAERAH

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Dinas PMPTSPTK merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2021 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
 - Administrator (Kelas 12) = 1 orang
 - Administrator (Kelas 11) = 4 orang
 - Pengawas = 16 orang
 - Pelaksana = 23 orang
 - Fungsional = 2 orang
- Jumlah = 46 orang**

Untuk mengetahui sumber daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1

Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon Per Desember 2022

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	4	-	6	1	2	1	2	6	-	-
2	Strata Satu (S1)	4	21	-	25	-	3	13	9	25	23	-
3	Diploma	-	3	1	4	-	-	2	2	4	0	-
4	SLTA	1	2	8	11	-	-	0	11	11	23	-
Jumlah		7	30	9	46	1	5	16	24	46	46	-

Sumber data : Subag. Umum, Kepeg. dan Keuangan Dinas PMPTSPTK Kab. Kepulauan Selayar Tahun Desember 2022

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja mempunyai peran penting dalam berdirinya suatu usaha karena tanpa adanya surat izin berusaha maka usaha tersebut bisa di katakana illegal dengan adanya izin usaha dan investasi serta pelatihan kepada masyarakat maka dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2022 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Raencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 7.387.971.641,- dengan rincian belanja operasi Rp. 7.221.925.641,- dan Belanja modal Rp. 166.046.000,-, selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp. 7.545.448.669,- dengan rincian belanja Operasi Rp. 7.453.675.669,- dan belanja modal Rp. 91.773.000,-. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp. 7.545.448.669,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp. 7.386.972.856,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 158.475.813,- dengan realisasi keuangan sebanyak 97,90%. Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang direncanakan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja melaksanakan 11 Program, 15 Kegiatan, dan 43 sub Kegiatan.

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Urusan Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSPK		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63,03%						
					83,00%	97,90%					
					Rp. 4.970.324.600,-	Rp. 4.893.180.841,-	98,45 %				
					a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				
						28.585.000,-	28.477.960,-			99,63 %	
						1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok			2 Dok	
						2.740.000,-	2.739.400,-			99,98 %	
						2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok			1 Dok	
						4.590.000,-	4.483.900,-			97,69 %	
						3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dok			1 Dok	
						4.000.000,-	4.000.000,-			100 %	
						4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok			1 Dok	
						4.000.000,-	4.000.000,-			100 %	
						5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dok			1 Dok	
						5.255.000,-	5.255.000,-			100 %	
6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok									
2.000.000,-	2.000.000,-	100 %									
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok									
6.000.000,-	5.999.660,-	99,99 %									
				b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%					
					3.740.235.000,-	3.672.678.850,-	98,19 %				
					1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	49	49				
3.724.015.000,-	3.656.458.850,-	98,19 %									

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok 4.220.000,-	1 Dok 4.220.000,-	100 %		
				3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	14 Dok 3.000.000,-	14 Dok 3.000.000,-	100 %		
				4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 laporan 9.000.000,-	12 laporan 9.000.000,-	100 %		
				c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100% 6.679.000,-	100% 6.679.000,-	100 %		
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok 2.150.000,-	2 Dok 2.150.000,-	100 %		
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dok 2.440.000,-	4 Dok 2.440.000,-	100 %		
				3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dok 2.089.000,-	2 Dok 2.089.000,-	100 %		
				d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% 382.327.600,-	100% 382.178.000,-	99,96 %		
				1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis 28.247.600,-	2 Jenis 28.197.500,-	99,82 %		
				2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis 14.400.000,-	3 Jenis 14.400.000,-	100 %		
				3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	350 SPD 339.680.000,-	350 SPD 339.580.500,-	99,97 %		
				e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 60.413.000,-	100% 59.205.000,-	98,00 %		
				1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 unit 13.000.000,-	1 unit 13.000.000,-	100 %		
				2) Pengadaan mebel	25 Unit 3.750.000,-	25 Unit 3.500.000,-	93,33 %		
				3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit 43.663.000,-	4 Unit 42.705.000,-	97,81 %		
				f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100% 485.307.000,-	100% 480.569.031,-	99,02		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Daerah					
				1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis layanan 153.031.000,-	3 Jenis layanan 152.522.431,-	99,67 %		
				2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Jenis layanan 332.276.000,-	3 Jenis layanan 328.046.600,-	98,73 %		
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 unit 266.778.000,-	32 unit 263.393.000,-	98,73 %		
				1) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis 44.220.000,-	5 Jenis 44.220.000,-	100 %		
				2) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 jenis 128.360.000,-	3 jenis 128.090.000,-	99,79 %		
				3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit 94.198.000,00	1 Unit 91.083.000,00	96,69 %		
				Program Promosi Penanaman Modal	20 Perusahaan 154.662.000,-	- 148.752.366,-	96,18 %	Minat Investor masih rendah disebabkan Kondisi Investasi Selayar masih menyediakan data potensi Investasi, Rendahnya serapan anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal disebabkan oleh item sewa Gedung	Berdasarkan arahan Kementerian Investasi, diharapkan Menyusun data Investasi berupa IPRO (Invesment Project Ready to Offer) yang kini dalam tahap penyusunan (IPRO KP3GS, IPRO Pengembangan Perikanan Budidaya Selayar, dan
				Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	2 Kali 154.662.000,-	2 Kali 148.752.366,-	96,18 %		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen 154.662.000,-	1 dokumen 148.752.366,-	96,18 %		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	52.000 393.394.000,-	12.826 319.688.000,-	81,26 %		
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.000 393.394.000,-	12.826 319.688.000,-	81,26 %		
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	182 orang 261.284.000,-	288 Orang 213.278.000,-	81,63 %		
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi	50 perusahaan	51 Perusahaan			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	132.110.000,-	106.410.000,-	80,55 %	tidak terealisasi karena kegiatan sosialisasi menggunakan Gedung milik daerah di Wilayah Kec. Kepulauan	IPRO Pengembangan budidaya Jeruk Keprop Selayar
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40%	100%			
					40.000.000,-	39.014.000,-	97,54 %		
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
					40.000.000,-	39.014.000,-	97,54 %		
				1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
					40.000.000,-	39.014.000,-	97,54 %		
				Program pelayanan Penanaman Modal	100%	100%			
					187.678.000,-	187.651.400,-	99,99		
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1200 izin	2773 Izin			
					187.678.000,-	187.651.400,-	99,99		
				1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1200 izin (Pelaku Usaha)	2773 Izin (Pelaku Usaha)			
					138.468.000,-	138.441.400,-	99,98		
				2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	32 Kali/ 215 Kegiatan Usaha			
					14.210.000,-	14.210.000,-	100 %		
				3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					20.000.000,-	20.000.000,-	100 %		
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 Koordinasi	3 Koordinasi			
					15.000.000,-	15.000.000,-	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%			
					21.250.000,-	21.184.000,-	99,69 %		
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
					21.250.000,-	21.184.000,-	99,69 %		
				1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Laporan	14 Laporan			
					21.250.000,-	21.184.000,-	99,69 %		
2	Urusan Bidang Tenaga Kerja	Dinas PMPTSPK		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,40%	2,28%			
					44,29%				
					152.756.069,-	152.612.069,-	99,91 %		
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	10 pelatihan				
					131.526.069,-	131.382.069,-	99,89 %		
				1) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	30 orang	30 orang			
					38.056.069,-	37.916.069,-			
				2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1 Lembaga (18 orang Alumni Mendapatkan Bantuan)	1 Lembaga (18 orang Alumni Mendapatkan Bantuan)			
					93.470.000,-	93.466.000,-	100 %		
				Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	5 Perusahaan	5 Perusahaan			
	21.230.000,-	21.230.000,-	100 %						
	1) Pelaksanaan Konsultasi	5 Perusahaan	5 Perusahaan						

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	21.230.000,-	21.230.000,-	100 %		
				Program Penempatan Tenaga Kerja	19,84%				
					587.944.000,-	587.825.180,-	99,98 %		
				Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	60 orang	265 orang			
					587.944.000,-	587.825.180,-	99,98 %		
				1) Penyediaan Sumber Daya Pelayan antar Kerja	2 layanan	Bimtek (25 Orang)			
					25.834.000,-	25.735.180,-	99,62 %		
				2) Pelayanan antar Kerja	50 orang	265 orang			
					12.110.000,-	12.090.000,-	99,83 %		
				3) Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100 Orang			
					550.000.000,-	550.000.000,-	100 %		
				Program Hubungan Industrial	0,60%	379 Badan Usaha			
					1.037.440.000,-	1.037.065.000,-	99,96 %		
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 perusahaan	379 Badan Usaha			
					2.320.000,-	2.320.000,-	100 %		
				1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10 perusahaan	-			
					2.320.000,-	2.320.000,-	100 %		
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	2 kali			
					1.035.120.000,-	1.034.745.000,-	99,96 %		
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2 program	6.000 orang (2 program)			
					1.035.120.000,-	1.034.745.000,-	99,96 %		

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	Ket.
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	Dinas PMPTSPTK					
1	Urusan Penanaman Modal					
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70,00 %	88,50 %	126,43%	
	2. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100 %	
	3. Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	Rp. Juta	38.000	11.056	29,09%	Kegiatan Investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencapai target disebabkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam OSS belum memperbaharui jumlah modalnya, sehingga pelaporan LKPM hanya sampai pada jumlah modal yang dilaporkan pada awal pendaftaran meskipun kegiatan usahanya mengalami peningkatan yang signifikan.
	4. Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	\$ Juta	1,00	0,12	12 %	Rendahnya realisasi investasi PMA disebabkan oleh pandemi Covid 19, sehingga investor belum optimal dalam melaksanakan kegiatan usahanya
	5. Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	%	100 %	100 %	100 %	
	6. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		2,75%	12,43%	452,00	Daya serap tenaga kerja dipengaruhi oleh lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah
2	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
	1. Tingkat Produktivitas tenaga kerja	%	44,29%	6,27%	14,15%	Tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh Rendahnya daya serap tenaga kerja
	2. Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	%	0	0	100%	
	3. Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	42,50 %	61,06 %	143,67%	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Penanaman Modal					
	Dinas PMPTSPTK					
	1. Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	40,00 %			
	2. Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PMDN (Rp Juta)	38.000	11.056	29,09%	Kegiatan Investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencapai target disebabkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam OSS belum memperbaharui jumlah modalnya, sehingga pelaporan LKPM hanya sampai pada jumlah modal yang dilaporkan pada awal pendaftaran meskipun kegiatan usahanya mengalami peningkatan yang signifikan.
		PMA = (\$ Juta)	1,00	0,12	12 %	Rendahnya realisasi investasi PMA disebabkan oleh pandemi Covid 19, sehingga investor belum optimal dalam melaksanakan kegiatan usahanya
	3. Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah	%	40,00	100%	250%	
	4. Persentase Izin yang diterbitkan	%	100	100	100	
5. Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100	100	100		
2	Urusan Bidang Tenaga Kerja					
	Dinas PMPTSPTK					
	1. Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK	%	70,00 %	45,45%	64,92%	
	2. Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	0,40	0,46%	115 %	
	3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	44,29 %	6,27 %	14,15%	Tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh Rendahnya daya serap tenaga kerja
	4. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	19,84 %	12,45 %	62,75%	Rendahnya tenaga kerja yang ditempatkan disebabkan oleh: 1. Ketidaksiharian kompetensi masyarakat dengan lapangan pekerjaan yang tersedia 2. Pengusaha/pemberi kerja/pekerja tidak melaporkan ke Dinas PMPTSPTK bila menerima pekerja baru 3. Calon tenaga kerja yang terdaftar Sebagian tidak menginformasikan terkait penempatannya
5. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	%	0,60%	16,61%	0		

2.1.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.767.308.600	5.609.470.607	157.837.993	97,26	6	95,52	12	97,35
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1.778.140.069	1.777.502.249	637.820	99,96	3	99,94	6	99,97
	Dinas PMPTSPTK	Rp. 7.545.448.669,-	Rp. 7.386.972.856,-	Rp. 158.475.813,-	97,90	11	97,08	15	

2.1.5. Inovasi

1. Program Inovasi PMPTSPTK

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Investment Project Ready to Offer (IPRO)	IPRO adalah kajian kelayakan suatu bidang usaha pada suatu proyek investasi yang memenuhi aspek hukum dan kelembagaan, aspek teknis, aspek ekonomi dan komersial, aspek lingkungan dan sosial, aspek bentuk dan cara pengusahaan, aspek pengelolaan resiko, serta aspek kebutuhan fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang disusun secara akurat dan lengkap, sehingga ketika ditawarkan dan dipromosikan kepada investor, dokumen Prastudi Kelayakan tersebut menjadi lebih bermutu dan bernilai (<i>marketable</i>).	1. Memperoleh gambaran uraian latar belakang dan gambaran umum dari pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi 2. Memperoleh gambaran uraian tentang kemungkinan (alternatif) bentuk badan hukum Indonesia yang dapat didirikan dalam rangka pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi. 3. Memperoleh gambaran situasi	

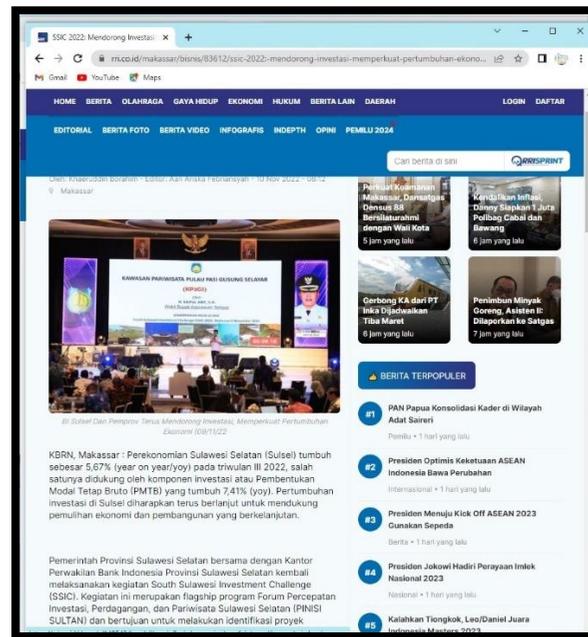
NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
			<p>lokasi bidang usaha pada proyek investasi sesuai posisi alamatnya yang tergambar secara rinci pada peta format digital</p> <p>4. Memperoleh gambaran makro pada kabupaten/kota tempat lokasi bidang usaha pada proyek investasi yang akan didirikan, dikembangkan dan dioperasikan</p> <p>5. Memperoleh gambaran dampak positif dan negatif yang timbul dalam kaitan pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi</p> <p>6. Memperoleh gambaran analisa rencana investasi, sumber dana beserta asumsi-asumsi dan proyeksinya.</p> <p>7. Memperoleh gambaran uraian sejauh mana risiko yang dihadapi badan usaha yang akan mendirikan, mengembangkan dan mengoperasikan bidang usaha pada proyek investasi</p>	
2	<p>Pusat Pelayanan Perizinan Kecamatan Kepulauan (Saya Pria Cakep)</p>	<p>a. menyediakan layanan perizinan dan non perizinan di 5 (lima) kecamatan Kepulauan</p> <p>b. menciptakan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat kecamatan kepulauan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan; dan</p> <p>c. memberikan kenyamanan dan keterjangkauan bagi masyarakat kecamatan kepulauan dalam mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan</p>	<p>Masyarakat Pulau yang mengurus perizinan usaha dan Izin lainnya tidak perlu ke Ibukota Kabupaten (Benteng), cukup datang ke Kantor Camat masing-masing. Kegiatan ini diawali dengan penyiapan operator minimal 1 (satu) orang per Kecamatan Pulau, 1 Set Komputer/Laptop serta jaringan Internet.</p>	

2.1.6. Prestasi dan Penghargaan

. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan kegiatan South Sulawesi Investment Challenge (SSIC). Kegiatan ini merupakan flagship program Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) dan bertujuan untuk melakukan identifikasi proyek potensial Kabupaten/Kota di Sulsel yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun asing. Kegiatan SSIC 2022 dilaksanakan pada 9 November 2022 di Kota Makassar dengan mengangkat tema “Enhancing Investment Optimism to Strengthen South Sulawesi Economy.”

Kegiatan SSIC 2022 mengundang 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan untuk menyampaikan proposal Investment Project Ready to Offer (IPRO). Rangkaian kegiatan SSIC 2022 telah dimulai sejak 19 September 2022 untuk pengumpulan proposal. Selanjutnya, juga telah dilaksanakan proses seleksi, verifikasi lapangan, dan coaching presentasi IPRO. Finalis SSIC 2022 melakukan presentasi dihadapan dewan juri, penilaian akhir menghasilkan 3 (tiga) pemenang yang berhasil meraih predikat proposal IPRO terbaik yaitu:

1. Terbaik pertama Kabupaten Bone dengan proposal IPRO Budidaya Ternak Sapi Potong;
2. Terbaik kedua Kota Makassar dengan proposal IPRO Jalur Pejalan Kaki Elevated Terintegrasi dengan Kawasan Ruang Publik Pantai Losari (Jappa Rate), dan;
3. Terbaik ketiga Kabupaten Kepulauan Selayar dengan proposal IPRO Kawasan Pengembangan Pariwisata Selayar (KPPS).



2. Realisasi Program Inovasi

Realisasi yang telah mulai dilaksanakan di tahun 2022 dalam mewujudkan program inovasi Dinas PMPTSPTK adalah:

a. Pusat Layanan Perizinan Kecamatan Kepulauan

“Saya Pria Cakep” merupakan akronim dari Pusat Layanan Perizinan Kecamatan Kepulauan adalah system dan wadah yang disiapkan khusus untuk warga masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendekatkan dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan perizinan. “Saya Pria Cakep” ini boleh dikatakan sebagai Unit Pelayanan Khusus Perizinan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk pada 5 Kecamatan Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar, bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan.

1. Telah Tersedia Aplikasi “Saya Pria Cakep” dengan nama “Si Pria Cakep”;
2. Telah tersedia Tenaga Operator “Saya Pria Cakep” terlatih sebanyak 20 orang;
3. Telah tersedia Sarana dan Prasarana “Saya Pria Cakep” di 5 Kecamatan Kepulauan yakni di 5 (lima) Kantor Camat dan 5 (Lima) Kantor Desa Pilot Project; dan telah dilakukan Pelayanan.
4. Telah terselenggara Layanan Perizinan di 5 (lima) Kecamatan Kepulauan melalui “Saya Pria Cakep”, telah terlayani Perizinan (NIB) sebanyak 30 izin.



b. G-SMS (Gerakan Satu Menanggung Satu)

G-SMS adalah salah satu program untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah dengan mengikutsertakan dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagkerjaan dengan cara satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menanggung pembayaran iuran minimal satu orang pekerja bukan penerima upah setiap bulannya. Sebagai

tahun permulaan G-SMS telah merekrut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 56 orang di tahun 2021.

Pemkab Selayar Mulai Sosialisasi Program Sikamaseang Bagi Pekerja Informal

By Firman
30 Nov 2021, 17:06:03 WIB | Sosialisasi 513

SOSIALISASI PROGRAM SIKAMASEANG
"Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : 800/279.a/K/2021/Dis.PMPTSP7K"

KEPULAUAN SELAYAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP7K) bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kepulauan Selayar melakukan sosialisasi Surat edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 800/279.a/K/2021/Dis.PMPTSP7K, tentang program Sikamaseang bagi pekerja informal dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

TEMUKAN JUGA KAMI DI
Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn

BERITA TERBARU

- Melibatkan GOW Dinilai Mampu Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
- Wabup Selayar Tampil Memukau di Hadapan 9 Panelis Sulsel Paritana Award Naker
- STQH XXXIII Resmi Dibuka, Bupati Selayar : Terapkan Nilai-Nilai Al-Ouran dan Hadits
- Melalui E-Filing Bupati Basri Aili Lakukan Validasi NIK Menjadi NPWP dan Laporkan SPT Pajak
- TP PKK Selayar Bantu Warga Korban Kebakaran di Tihoro Dusun Karama

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan yang diambil meliputi kebijakan peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah yang menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah

NO	Dasar Hukum		Nama OPD
	Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang	
1.	8 Tahun 2022/ 28 Desember 2022	Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah	Dinas PMPTSPTK

b. Peraturan Bupati

NO	Dasar Hukum		Nama OPD
	Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang	
1	17 Tahun 2022 / 20 April 2022	Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Dinas PMPTSPTK
2	19 Tahun 2022/ 23 Mei 2022	Pusat Layanan Perizinan Kecamatan Kepulauan	Dinas PMPTSPTK
3	21 Tahun 2022/ 24 Mei 2022	Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Dinas PMPTSPTK
4	40 Tahun 2022/ 17 November 2022	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan	Dinas PMPTSPTK
5	37 Tahun 2022/ 17 November 2022	Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak	Dinas PMPTSPTK

c. Keputusan Bupati

NO.	Dasar Hukum		Nama OPD
	Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang	
1	107/III/Tahun 2022 / 7 Maret 2022	Tentang Penerimaan Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal	Dinas PMPTSPTK
2	500/XI/Tahun 2022/ 17 November 2022	Penerimaan Bantuan Sosial Permodalan Bagi Alumni Balai Latihan Kerja dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2022	Dinas PMPTSPTK
3	557/XII/Tahun 2022 / 6 Desember 2022	Tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Peralatan Perbengkelan Bagi Alumni Balai Latihan Kerja pada Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022	Dinas PMPTSPTK

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

**DINAS PMPTSPTK TIDAK MENDAPATKAN
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

3.2. Hambatan-Hambatan

“Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan Penugasan”

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus diakui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami perbaiki, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah ***“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Benteng, 9 Januari 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja**



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19750101 199903 1 010